



## **ANALISIS SISTEM LAPORAN KEUANGAN DI KECAMATAN DENAI KELURAHAN BINJAI**

### ***ANALYSIS OF THE FINANCIAL REPORTING SYSTEM IN THE DENAI SUB-DISTRICT OF BINJAI VILLAGE***

**Kaiesa Raihatul Muntaza<sup>1</sup>, Salma Diani Siregar<sup>2</sup>, Putri Kemala Dewi<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Medan

Email : [kaiesamuntazza@gmail.com](mailto:kaiesamuntazza@gmail.com)<sup>1\*</sup>, [salmadianisiregar05@gmail.com](mailto:salmadianisiregar05@gmail.com)

---

#### Article Info

##### Article history :

Received :15-06-2024

Revised :17-06-2024

Accepted :19-06-2024

Published:21-06-2024

#### Abstract

*In Government Regulation (PP) No. 17/2018 concerning Sub-districts, states that the definition of a sub-district is part of the sub-district area as a sub-district device. Meanwhile, urban village finances come from the Regency / City APBD which is allocated as other regional apparatus, government assistance, be it the Provincial Government, Regency / City Government or assistance from third parties, as well as other legal and non-binding sources. The aim is to know and understand how the process of preparing financial reports, as well as how the village or the secretary of the village overcomes if in the process of preparing financial reports there are obstacles or problems in BINJAI Village. The method used in this research is a qualitative approach with data collection techniques through interviews and document analysis. The results showed that BINJAI Village uses the RI Regional Government Information System (SIPD). The Local Government Information System (SIPD) is a system that functions to provide information to the public about the administration of local government. SIPD was formed based on Law (UU) Number 23 of 2014 Article 391, which emphasizes that the Regional Government is obliged to provide regional government information managed in a Regional Government Information System. This study concludes that using the RI regional government information system (SIPD) can make it easier to manage and compile financial reports for the binjai urban village easily and effectively and, there will be no wrong financial input.*

**Keywords : Financial Statements, Accounting, Village**

---

#### Abstrak

Dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, menyebutkan bahwa definisi dari kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan. Sementara itu, keuangan kelurahan berasal dari APBD Kabupaten/Kota yang dialokasikan sebagaimana perangkat daerah lainnya, bantuan pemerintah baik itu Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota maupun bantuan dari pihak ketiga, serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat. Tujuannya untuk mengetahui dan memahami bagaimana proses penyusunan laporan keuangan, serta bagaimana kelurahan atau sekretaris lurah mengatasi jika di dalam proses penyusunan laporan keuangan itu terjadi kendala atau permasalahan di Kelurahan BINJAI. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan teknik



pengumpulan data melalui wawancara dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kelurahan BINJAI menggunakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) RI. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) adalah suatu sistem yang berfungsi menyediakan informasi kepada masyarakat tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah. SIPD dibentuk berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 391, yang menegaskan bahwa Pemerintah Daerah wajib menyediakan informasi pemerintahan daerah yang dikelola dalam suatu Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa dengan menggunakan sistem informasi pemerintahan daerah (SIPD) RI dapat mempermudah mengelola dan menyusun laporan keuangan kelurahan binjai dengan mudah dan efektif serta, tidak akan ada terjadinya salah input keuangan.

**Kata Kunci : Laporan Keuangan, Akuntansi, Kelurahan**

## **PENDAHULUAN**

Kelurahan adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia setelah kecamatan. Kelurahan merupakan wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kota, dipimpin oleh seorang lurah yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, dan memiliki fungsi administratif tertentu, seperti pelayanan administrasi kependudukan, pembangunan, dan pelayanan sosial dasar. Kelurahan merupakan unit pemerintahan terkecil setingkat dengan desa, tetapi memiliki hak mengatur wilayahnya lebih terbatas. Kelurahan biasanya terletak di dalam kota atau kabupaten dan memiliki populasi yang lebih besar dibandingkan dengan desa.

Keuangan kelurahan berasal dari APBD Kabupaten/Kota yang dialokasikan sebagaimana perangkat daerah lainnya, bantuan pemerintah baik itu Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota maupun bantuan dari pihak ketiga, serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat. Pada pasal 30 ayat (1) Pemerintah Daerah Kabupaten/kota mengalokasikan anggaran dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota untuk pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan. Dan ayat (2) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimasukkan ke dalam anggaran Kecamatan pada bagian anggaran Kelurahan untuk dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Laporan keuangan kelurahan adalah catatan informasi keuangan dari suatu kelurahan pada suatu periode akuntansi. Laporan ini berisi data keuangan yang digunakan untuk menggambarkan situasi kinerja keuangan dan hasil operasi dari kelurahan. Laporan keuangan kelurahan juga sangat penting untuk kelurahan karena digunakan sebagai indikator laporan arus kas di periode-periode mendatang dan sebagai dokumen penting untuk pertanggung jawaban transaksi masuk dan keluar dari kelurahan.

Saat ini laporan keuangan pemerintah pusat dan daerah disusun berdasarkan penerapan akuntansi basis akrual. Komponen laporan keuangan pemerintah berbasis akrual terdiri dari, Laporan Pelaksanaan Anggaran, Laporan Finansial dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Pembuatan laporan keuangan kelurahan dilakukan dalam periode tertentu, biasanya setiap akhir tahun atau beberapa bulan sekali. Laporan keuangan kelurahan memuat catatan keuangan dalam periode waktu tertentu yang disebut sebagai periode akuntansi. Periode akuntansi ini ditentukan oleh kelurahan masing-masing. Laporan keuangan kelurahan juga memuat catatan



tambahan yang diberikan sebagai informasi tambahan dan penjelas terhadap isi laporan keuangan. Dalam pelaksanaannya, laporan keuangan kelurahan harus disusun dengan akurat dan benar. Itu artinya, pencatatan tersebut harus dilakukan dengan teliti dan sesuai dengan keadaan kelurahan tanpa perlu dikurangi atau ditambah.

## **METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan penelitian kualitatif disertai metode penelitian deskriptif. Pendekatan kualitatif merupakan metode penelitian yang penting untuk memahami fenomena sosial dan pengalaman individu atau kelompok yang di dalam usulan penelitian, proses, hipotesis, turun ke lapangan, analisis data dan kesimpulan data. Dalam mengumpulkan data pada penelitian ini. Metode deskriptif adalah suatu metode penelitian yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak dapat digunakan untuk menarik kesimpulan yang berupa prediksi atau generalisasi. Metode ini berfungsi untuk mendapatkan data-data secara mendalam dan memberikan gambaran yang rinci

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Sistem Keuangan Kelurahan BINJAI:**

Kelurahan BINJAI merupakan salah satu kelurahan dari Kecamatan Medan Denai. Kantor kelurahan BINJAI melayani masyarakat dalam memenuhi kebutuhan administrasi kependudukan. Profil Kelurahan BINJAI:

1. Jumlah tenaga kerja seharusnya 17 pekerja akan tetapi di Kelurahan Binjai ini hanya ada 12 pekerja
2. Kantor Kelurahan Binjai ini melayani izin untuk mengurus surat keterangan domisili, pengurusan NPWP, surat keterangan baik, surat keterangan tidak mampu, surat keterangan miskin dan banyak lagi.
3. Kelurahan BINJAI menggunakan SIPD untuk melaporkan keuangan mereka.

SIPD merupakan Sitem Informasi Pemerintahan Daerah yang menyediakan data dan informasi pembangunan daerah yang terintegrasi dan akurat. SIPD digunakan untuk sistem informasi pembangunan daerah, sistem informasi keuangan daerah, dan sistem informasi pemerintahan daerah lainnya. Karna Kelurahan Binjai sekarang sudah menggunakan SIPD maka akan jarang sekali terjadi kesalahan dalam pemasukan angka keuangan, jika terjadi maka dari itu disebabkan karena kesengajaan oleh oknum-oknum.

### **Kelurahan Binjai Mengatasi Kendala Dan Permasalahan Selama Proses Penyusunan Laporan Keuangan Binjai**

Kendala yang sering terjadi di Kelurahan Binjai adalah kekurangan sumber daya manusia (SDM).

1. Penggunaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)



SIPD RI membantu meningkatkan keterintegrasi data, meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan, dan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

2. Penggunaan Peraturan Daerah  
Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah memberikan pedoman yang jelas dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan Pemerintah Daerah.
3. Penggunaan Bagan Akun Standar (BAS)  
BAS memberikan pedoman dalam pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah, sehingga memudahkan proses penyusunan laporan keuangan.
4. Penggunaan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD)  
SAPD membantu mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi Pemerintahan Daerah.
5. Penggunaan Pendampingan dan Pelatihan  
Pendampingan dan pelatihan diberikan kepada pelaku UMKM untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan dalam menyusun laporan keuangan, sehingga mereka dapat menyusun laporan keuangan secara mandiri.
6. Penggunaan Data dan Informasi  
Penggunaan data dan informasi yang akurat dan lengkap membantu meningkatkan kualitas laporan keuangan dan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Dengan demikian, Kelurahan Binjai dapat mengatasi kendala dan tantangan selama proses penyusunan laporan keuangan dengan menggunakan berbagai sistem, peraturan, dan pendampingan yang tersedia.

### **Tahap-tahap Dalam Proses Penyusunan Laporan Keuangan Kelurahan Binjai**

1. Penyusunan Anggaran  
Pemerintah Kelurahan Binjai menyusun anggaran yang berisi rencana pendapatan dan belanja untuk suatu periode
2. Pelaksanaan Anggaran  
Pemerintah Kelurahan Binjai melaksanakan anggaran yang telah disusun dan mengumpulkan data pendapatan dan belanja.
3. Penyajian Laporan Keuangan  
Pemerintah Kelurahan Binjai menyajikan laporan keuangan yang berisi informasi tentang realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran.
4. Penyajian Laporan Neraca  
Pemerintah Kelurahan Binjai juga menyajikan laporan neraca yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.
5. Penyajian Laporan Operasional  
Pemerintah Kelurahan Binjai menyajikan laporan operasional yang menyajikan ikhtisar sumber daya dan penggunaan sumber daya dalam suatu periode.



6. Penyajian Laporan Perubahan Ekuitas  
Pemerintah Kelurahan Binjai menyajikan laporan perubahan ekuitas yang menggambarkan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan dalam suatu periode.
7. Penyajian Laporan Arus Kas  
Pemerintah Kelurahan Binjai menyajikan laporan arus kas yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal tertentu.

## KESIMPULAN

Kelurahan mempunyai tugas membina dan mengelola administrasi kesekretariatan yang meliputi pengelolaan keuangan, pengelolaan aset, dan pengelolaan biaya. Kelurahan juga mempunyai tugas mengawasi dan mengendalikan penggunaan dana dan aset yang ada di wilayahnya. Sistem Laporan Keuangan (SLK) adalah sistem untuk mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data keuangan organisasi. Penyusunan laporan keuangan mencerminkan kinerja dan posisi keuangan entitas dalam periode tertentu. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) RI membantu Kelurahan Binjai mengelola dan menyusun laporan keuangan lebih mudah dan efektif.

Laporan keuangan kelurahan memuat anggaran dan realisasi selama periode pelaporan serta menyediakan informasi mengenai apakah sumber daya ekonomi telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan. Kelurahan Binjai mengelola dan menyusun laporan keuangan lebih mudah dan efektif. Kelurahan Binjai juga dapat mengatasi kendala dan tantangan selama proses penyusunan laporan keuangan dengan menggunakan berbagai sistem, peraturan, dan pendampingan yang tersedia.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam penyusunan jurnal ini, penulis menyadari adanya kekurangan dan ketidaksempurnaan serta telah berusaha menyajikan yang terbaik. Penguji juga banyak mengucapkan terimakasih kepada bapak lurah yang telah memberi kesempatan untuk wawancara. Peneliti mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang turut membantu, khususnya kepada Ibu Putri Kemala Dewi, S.E, M.Si., Ak. selaku dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Sektor Publik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, S., & Br Tarigan, E. S. (2021). Pelatihan Penyusunan Laporan Keuangan Di Kelurahan Cibubur Jakarta Timur. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Madani*, 22-30.
- Kasenda, H., Sambiran, S., & Sumampow, I. (2021). Transparansi Pengelolaan Dana Kelurahan Dalam Pembangunan Di Kelurahan. *JURNAL GOVERNANCE*, 1-9.
- Monika, M., & Wafa, Z. (2023). Pendampingan Pembuatan Laporan Keuangan Di Kelurahan Maguwoharjo Dengan. *Jurnal Informasi Pengabdian Masyarakat*, 56-62.